

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Fee Audit

Menurut Rohmaniyah (2017) *fee* audit ialah bayaran yang diperoleh auditor setelah memberi jasa pemeriksaan audit yang jumlahnya disesuaikan dengan risiko audit dan berasal dari hasil diskusi yang telah terjadi antara auditor dan klien. Imbalan jasa yang diterima Akuntan Publik dari perusahaan klien sehubungan dengan jasa audit merupakan *fee* audit (IAPI, 2016). Pendapat lainnya menyatakan *fee* audit merupakan suatu upah yang menjadi beban perusahaan karena proses audit yang dilakukan auditor.

Di Indonesia, pemberian *fee* audit dilakukan secara *voluntary disclosure*. Peraturan Pengurus IAPI No. 2 Tahun 2016 menyatakan panduan guna menentukan imbalan yang wajar atas jasa profesional yang dilakukan anggota IAPI kepada klien. Oleh karena potensi adanya ancaman ketidaktaatan terhadap kode etik profesi akuntan publik yang berlaku, maka imbal jasa yang diberikan tidak boleh terlalu rendah. Berikut panduan mengenai dasar penentuan imbal jasa audit oleh surat keputusan ketua umum IAPI PP No. 2 Tahun 2016:

- a. Ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan dari klien;
- b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit;
- c. Tugas serta tanggung jawab menurut hukum;
- d. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan;

- e. Tingkat kompleksitas pekerjaan;
- f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- g. Sistem pengendalian mutu kantor; dan
- h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

IAPI memberikan indikator batas bawah imbalan jasa per jam yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: IAPI, 2016.

Batas diatas dijadikan nilai indikator batas bawah dan menjadi acuan dalam penentuan imbal jasa sesuai klasifikasi yang ditentukan. Apabila imbal jasa yang ditetapkan lebih rendah daripada ketentuan yang ada maka terdapat kemungkinan tidak dapat dilaksanakan prosedur audit sesuai kode etik, SPAP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Teori Agensi

Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling memperkenalkan teori agensi (*agency theory*). Teori keagenan mendeskripsikan keterikatan antara pihak tertentu yakni *principal* yang memberikan kuasa kepada pihak *agent* guna melaksanakan suatu tindakan sehingga tercapainya kepentingan dari *principal*. Menurut Scott (2015) konsep *agency theory* merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari skema dari kontrak guna memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal*. Terjadinya pemisahan wewenang dan kewajiban antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat mengakibatkan timbul konflik keagenan (Yulianti, Agustin, dan Taqwa, 2019).

Agent berfungsi memberikan jasa kepada *principal*. *Agent* merupakan pihak yang membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan, seperti manajer atau dewan direksi. Sedangkan *Principal* merupakan pihak yang mengevaluasi informasi, seperti pemegang saham. Apabila kedua belah pihak merupakan orang-orang yang berambisi untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri, maka ada alasan kuat bagi *agent* untuk tidak selalu memberi yang terbaik bagi kepentingan *principal*. Masalah lain yang sering ditemukan adalah adanya *asymmetric information* antara *agent* dengan *principal*. *Asymmetric information* terjadi karena adanya perbedaan kepemilikan informasi dimana informasi terdistribusi secara tidak merata antara *agent* dan *principal*. *Agent* yang aktif berperan dalam pengambilan keputusan kinerja perusahaan memiliki akses informasi lebih banyak daripada *principal* yang hanya memiliki informasi berdasarkan pada laporan

keuangan. *Agent* cenderung mengubah laporan guna memperoleh penilaian kinerja yang bagus dan mendapatkan rasa percaya *principal*.

Oleh karena dampak dari konflik yang dapat timbul, diperlukan uji atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh *agent* guna membuktikan apakah laporan keuangan yang dibuat dapat dipercaya (*reliable*). Aktivitas *agent* akan diawasi oleh auditor eksternal agar *agent* bertindak sesuai aturan yang ada. Pengawasan yang dilakukan auditor eksternal menimbulkan biaya agensi (*agency cost*) yang terdiri dari biaya pemantauan (*monitoring*), biaya kompensasi insentif (*bonding cost*), kerugian residual akibat adanya perbedaan preferensi. Biaya yang dikeluarkan oleh *principal* merupakan *fee* audit yang diterima auditor. Upaya ini dilakukan *principal* untuk memantau, mengamati dan menilai tingkah laku *agent*.

2.3. Ukuran Perusahaan

Widiastari dan Yasa (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang mengkategorisasi besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diukur melalui total aset, penjualan, serta nilai saham. Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi 3, yakni: perusahaan berskala besar (*big firm*), perusahaan berskala menengah (*medium firm*), dan perusahaan berskala kecil (*small firm*) (Yulianti, Agustin, dan Taqwa, 2019). Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 kategori yakni:

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Milyar
Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Milyar	> 2,5 Milyar – 50 Milyar
Usaha Besar	> 10 Milyar	> 50 Milyar

Immanuel dan Yuyetta (2014) menyebutkan informasi terkait besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Tingkat risiko yang besar dimiliki oleh perusahaan berskala besar daripada kecil (Huri dan Syofyan, 2019). Transaksi yang lebih banyak serta rumit cenderung dimiliki oleh perusahaan yang lebih besar. Proses audit akan menjadi lebih lama dan berpengaruh terhadap besaran *fee* audit yang diterima auditor.

2.4. Debt to Asset Ratio (DAR)

Kasmir (2012) menyebutkan bahwa *debt to asset ratio* merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang yang dimiliki perusahaan baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Fahmi (2011:127) berpendapat *debt to asset ratio* adalah rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan

total utang dibagi total aset. *Debt to asset ratio* menunjukkan seberapa besar utang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan aset perusahaan. Fakhruddin (2008) menyebutkan bahwa *debt to asset ratio* merupakan total utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Terdapat beberapa manfaat dari *debt to asset ratio*, yakni:

- 1) Menganalisis status perusahaan dalam kemampuannya untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga.
- 2) Mengetahui posisi perusahaan dengan melihat keseimbangan modal serta aset yang dimiliki.
- 3) Mengetahui pengaruh utang yang dimiliki perusahaan terhadap aset yang dikelola.
- 4) Mengetahui dan mengukur bagian rupiah modal sendiri yang menjadi jaminan utang jangka panjang.

Semakin rendah *debt to asset ratio* semakin baik juga kondisi keuangan perusahaan. Nilai *debt to asset ratio* yang tinggi menandakan bahwa pendanaan perusahaan dengan utang juga semakin banyak. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman karena terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan tidak akan mampu menutupi utang dengan aset yang dimiliki. Marcus (2007) menyebutkan bahwa rumus menghitung *debt to asset ratio*, sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Terdapat beberapa penilaian *debt to asset ratio* sehingga dapat dikatakan baik, yakni :

- Apabila perusahaan memiliki *debt to asset ratio* kurang dari 0,5 maka diartikan bahwa ekuitas membiayai sebagian besar aset perusahaan.
- Apabila perusahaan memiliki *debt to asset ratio* lebih besar dari 0,5 kali maka diartikan bahwa hutang yang dimiliki perusahaan membiayai sebagian besar aset perusahaan.
- Nilai *debt to asset ratio* sebesar 0,6–0,7 kali diartikan normal. Namun perlu melihat penilaian spesifik sesuai industri karena tiap industri memiliki penilaian yang berbeda-beda.

2.5. Kompleksitas Perusahaan

Menurut KBBI, kompleksitas berarti kerumitan. Kompleksitas perusahaan adalah “hal yang berkaitan dengan kerumitan transaksi pada perusahaan” (Cameran, 2005 dan Yulio, 2006). Huri dan Syofyan (2019) menyatakan bahwa kompleksitas suatu perusahaan merupakan hasil transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing, jumlah cabang dan operasi bisnis serta jumlah anak perusahaan. Kompleksitas jasa yang dilakukan auditor bisa terlihat dari jumlah perusahaan anak milik klien dan berdasarkan kerumitan transaksi yang terjadi dalam perusahaan klien KAP (Huri dan Syofyan, 2019).

Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh pihak lain disebut sebagai anak perusahaan. Perusahaan induk wajib menerbitkan laporan keuangan konsolidasi beserta anak perusahaannya. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh klien berpengaruh terhadap tingkat risiko yang harus dihadapi auditor karena dibutuhkan kecermatan tinggi saat melakukan proses audit. Tingginya kompleksitas perusahaan klien memberikan dampak pada tingkat kesulitan (*task*

difficulty) dan variabilitas tugas (*task variability*) terkait informasi perusahaan yang harus dikumpulkan oleh auditor eksternal. Dibutuhkan waktu yang lama dan ketelitian tinggi apabila tingkat kerumitan tugas yang dikerjakan seorang auditor semakin tinggi. Oleh sebab itu, *fee* audit yang akan dibayar akan semakin tinggi.

2.6. Afiliasi KAP

Afiliasi merupakan hubungan yang terjalin antara dua pihak atau lebih yang memiliki kesamaan tujuan dengan dasar saling membutuhkan atau kepentingan yang sama. Chaplin (2011) menyebutkan bahwa afiliasi merupakan bentuk kebutuhan akan pertalian dengan pihak lain, pembentukan persahabatan, ikut serta dalam kelompok tertentu, kerja sama dan kooperasi. Afiliasi KAP merupakan pengklasifikasian KAP berdasarkan *big four* dan *non big four* (Andreas & Chang, 2020).

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah organisasi akuntan publik yang dalam operasionalnya sudah memperoleh izin beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah disepakati terkait jasa profesional yang disediakan sebagai seorang akuntan publik. Selain memberikan jasa audit, KAP dapat memberi jasa yang berkaitan dengan akuntansi, finansial, manajemen, perpajakan, atau konsultasi sesuai dengan kompetensi auditor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.

Afiliasi KAP tergolong ke dalam 2 afiliasi, yakni KAP yang berafiliasi dengan *big four* dan KAP yang berafiliasi dengan *non big four*. KAP *big four* memiliki sumber daya dan jumlah tenaga-tenaga profesional yang lebih banyak,

tenaga kerja dipilih dari seleksi ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan sehingga tenaga kerja kompeten ada di dalamnya. Keberagaman klien yang dimiliki KAP *big four* membuat para auditor mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan dibandingkan auditor KAP *non big four*.

Halim (1997) menyebutkan bahwa perusahaan yang *go public* cenderung mencari KAP yang memiliki reputasi lebih tinggi dan baik di mata pengguna laporan keuangan guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan mendapatkan kepercayaan. Auditor di Indonesia yang sudah berafiliasi dengan KAP *big four*, antara lain:

- a. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Purwanto, Suherman, dan Surja.
- b. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta dan Widjaja.
- c. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Osman Bing Satrio dan Rekan
- d. Pricewaterhouse Cooper (PwC) yang berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan.

KAP yang berafiliasi dengan *big four* dianggap lebih mampu mempertahankan independensi dan menjalankan tugas audit yang lebih berat dan rumit.

2.7. Penelitian Terdahulu

Yusica dan Sulistyowati (2020) melakukan penelitian dengan variabel independen kompleksitas perusahaan (X1), internal audit (X2) dan risiko audit (X3)

serta *audit fee* (Y) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan yang diproksikan dengan anak perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*. Sedangkan internal audit berpengaruh negatif dan risiko audit tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 80 sampel berasal dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.

Naser dan Nuseibeh (2007) melakukan penelitian dengan *corporate size* (X1), *status of the audit firm* (X2), *corporate complexity* (X3), *industry* (X4), *profitability* (X5), *corporate risk* (X6), *corporate accounting year-end* (YEND) (X7) *time lag between YEND* (X8), dan *the audit report date* (X9) sebagai variabel independen dan *audit fee* (Y) sebagai variabel dependen. Naser dan Nuseibeh menemukan bahwa *corporate size*, *status of the audit firm* yang diproksikan dengan afiliasi KAP internasional dan lokal, *corporate complexity* yang diproksikan dengan anak perusahaan, serta *corporate risk* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sedangkan *industry type* berpengaruh negatif terhadap *audit fee* dan *profitability*, *corporate accounting year-end* (YEND), *lag between YEND* dan *the audit report date* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel berasal dari 181 perusahaan yang terdaftar di ASE pada tahun 2000/2001. Naser dan Nuseibeh mengklaim bahwa penelitian ini memberikan kontribusi karena penelitian dilakukan pada lingkungan yang unik, yakni wilayah Timur Tengah dan pada saat itu perusahaan di Jordania menjadi satu-satunya perusahaan di wilayah Arab yang mengungkapkan *fee* audit pada laporan tahunan.

Melinda dan Triyanto (2021) melakukan penelitian ini dengan risiko perusahaan (X1), kompleksitas perusahaan (X2), *managerial ownership* (X3) dan *audit partner rotation* (X4) sebagai variabel independen dan *audit fee* (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial kompleksitas perusahaan yang diukur menggunakan jumlah anak perusahaan dan *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap *audit fee* sedangkan risiko perusahaan dan *audit partner rotation* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 90 sampel berasal dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2020.

Suryanto, Siskawati dan Sofyani (2018) melakukan penelitian dengan komisaris independen (X1), komite audit (X2), keberadaan pemegang saham mayoritas (X3), risiko perusahaan (X4) dan ukuran perusahaan (X5) sebagai variabel independen dan *fee audit* (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur logaritma natural total aset dan risiko perusahaan yang diproksikan peringkat obligasi berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Sedangkan komisaris independen, komite audit dan keberadaan pemegang saham mayoritas tidak berpengaruh terhadap *fee audit*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 104 sampel berasal dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2013.

Sibuea dan Arfianti (2021) melakukan penelitian dengan kualitas audit (X1), ukuran perusahaan (X2), kompleksitas perusahaan (X3) dan risiko perusahaan (X4) sebagai variabel independen dan *audit fee* (Y) sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran

KAP, ukuran perusahaan yang diukur menggunakan total aset dan kompleksitas perusahaan yang diproksikan dengan anak perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sedangkan risiko perusahaan yang digambarkan dengan rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel berasal dari 54 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019.

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian yang disusun oleh peneliti. Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Objek	Hasil Penelitian
1	Yusica dan Sulistyowati (2020)	<p>Dependen</p> <p><i>Audit Fee</i></p> <p>Independen</p> <p>Kompleksitas Perusahaan (X1), Internal Audit (X2), dan Risiko Audit (X3).</p>	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.	Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Audit Fee</i> . Sedangkan Internal audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Fee</i> serta Risiko audit

				tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Fee</i> .
2	Naser dan Nuseibeh (2007).	<p>Dependen</p> <p><i>Audit Fee</i></p> <p>Independen</p> <p><i>Corporate size (X1), Status of the audit firm (X2), Corporate complexity (X3), Industry (X4), Profitability (X5), Risk (X6), Corporate accounting year-end (YEND) (X7), Time lag between YEND (X8) and The audit report date (X9)</i></p>	<i>Companies in emerging economy, Jordan.</i>	<p>Ukuran perusahaan, Afiliasi KAP, Kompleksitas perusahaan dan Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Audit Fee</i>. Sedangkan Jenis industri berpengaruh negatif serta Profitabilitas, <i>Accounting year end, Time lag between YEND dan tanggal laporan</i></p>

				audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Fee</i> .
3	Melinda dan Triyanto (2021)	<p>Dependen</p> <p><i>Audit Fee</i></p> <p>Independen</p> <p>Risiko Perusahaan (X1), Kompleksitas Perusahaan (X2), <i>Managerial Ownership</i> (X3), dan <i>Audit Partner Rotation</i> (X4).</p>	Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.	Kompleksitas perusahaan dan <i>Managerial Ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>Audit Fee</i> . Sedangkan Risiko perusahaan dan <i>Audit Partner Rotation</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Fee</i> .
4	Suryanto, Siskawati dan Sofyani (2018)	<p>Dependen</p> <p><i>Fee Audit</i></p> <p>Independen</p> <p>Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2),</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek	Variabel Risiko perusahaan dan Ukuran perusahaan

		Pemegang Saham Mayoritas (X3), Risiko Perusahaan (X4) dan Ukuran Perusahaan (X5).	Indonesia 2017-2019.	berpengaruh positif terhadap <i>Fee</i> Audit. Sedangkan Komisaris Independen, Komite Audit dan Pemegang Saham Mayoritas tidak berpengaruh terhadap <i>Fee</i> Audit.
5	Sibuea dan Arfianti (2021)	Dependen <i>Audit Fee</i> Independen Kualitas Audit (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Kompleksitas Perusahaan (X3), dan Risiko Perusahaan (X4).	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.	Kualitas audit, Ukuran perusahaan, dan Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Audit Fee</i> . Tidak terdapat bukti bahwa

				risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Audit Fee</i> .
--	--	--	--	---

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee Audit*

Ukuran suatu perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diketahui melalui total aset, nilai buku ekuitas dan total pendapatan penjualan (Al-khazali dan Zoubi, 2005). Dalam penelitian ini, total aset menjadi indikator ukuran suatu perusahaan. Total aset perusahaan mencerminkan hasil aktivitas bisnis yang dilakukan suatu perusahaan. Proses audit yang akan dilakukan auditor berbeda sesuai dengan ukuran perusahaan klien. Klien dengan skala besar cenderung memiliki total aset lebih besar dengan transaksi lebih banyak daripada klien berskala kecil. Perusahaan berskala besar mengakibatkan auditor menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, serta biaya yang lebih besar dan lama guna mengaudit suatu perusahaan yang besar. Kompleksitas proses mengakibatkan *fee* audit yang diberikan bagi auditor semakin tinggi.

Hal ini didukung oleh penelitian terkait *fee* audit telah dilakukan oleh Naser dan Nuseibeh (2007), Huri dan Syofyan (2019), Sibuea dan Arfianti

(2021) mengungkapkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang diajukan, yakni:

H₁ = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit

2.8.2. Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Fee audit

Menurut Mussalo (2015) rasio utang digunakan dalam pengukuran saat krisis keuangan perusahaan terjadi. *Debt to asset ratio* dapat mengukur apakah perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya dan melunasi utangnya. Wondabio (2006) mengungkapkan tingkat *debt to asset ratio* yang tinggi pada suatu perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam tekanan finansial sehingga perusahaan berusaha menekan biaya di perusahaan. Pandia dan Fachriyah (2021) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki *debt to asset ratio* yang tinggi tidak membayar *fee* audit yang tinggi karena perusahaan mencoba mengurangi pengeluaran yang ada guna mengurangi beban utang perusahaan.

Wallace, Naser & Mora (1994) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *debt to asset ratio* yang tinggi mengharuskan manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi terkait keuangan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pihak kreditor. Informasi lengkap dan rinci yang diungkapkan manajemen mempengaruhi usaha dan waktu auditor sehingga auditor tidak perlu menambah tim audit dan lama waktu yang dibutuhkan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *debt to asset ratio* menyebabkan rendahnya *fee* yang diterima oleh auditor. Pernyataan ini

didukung oleh penelitian terkait *fee* audit yang telah dilakukan oleh Pandia dan Fachriyah (2021) serta penelitian oleh Primasari dan Zulaikha (2017) yang menunjukkan bahwa *debt to asset ratio* berpengaruh negatif terhadap *fee* audit. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ = Debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap *fee* audit

2.8.3. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Fee* Audit

Rukmana, Konde, dan Setiawaty (2017) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kompleksitas perusahaan dinilai dengan jumlah anak perusahaan yang dimiliki klien, baik di dalam maupun luar negeri. PSAK No. 15 mendefinisikan anak perusahaan sebagai bentuk organisasi di mana kendali dan penyertaan modalnya berasal dari perusahaan induk.

Dibutuhkan waktu yang lebih lama guna mengumpulkan bukti audit apabila klien memiliki banyak anak perusahaan. Hal tersebut menyebabkan tenaga dan *staff* yang diperlukan untuk proses audit semakin banyak karena ruang lingkup pengauditan menjadi lebih besar dan rumit. Oleh karena itu, klien dengan anak perusahaan yang banyak harus memberikan *fee* audit lebih tinggi kepada auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusica dan Sulistyowati (2020), Melinda dan Triyanto (2021), Sibuea dan Arfianti (2021) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ = Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit

2.8.4. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap *Fee* Audit

Afiliasi KAP menjadi representasi kualitas audit berkaitan dengan reputasi, kompetensi dan independensi auditor (De Angelo, 1981). Terdapat 2 golongan afiliasi, yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan KAP yang berafiliasi dengan KAP *non big four*. Menurut David M dan Butar (2020) pengauditan yang dilaksanakan oleh afiliasi *big four* dapat meningkatkan reputasi klien.

Khikia (2014) menyebutkan bahwa KAP *big four* memiliki sumber finansial yang besar sehingga dapat berinvestasi guna menunjang kinerja auditor menjadi lebih baik lagi melalui pelatihan SDM serta fasilitas teknologi yang digunakan. KAP *big four* memiliki jam terbang dan pengalaman yang lebih tinggi sehingga terdapat keyakinan bahwa kompetensi dan independensi lebih serta efektivitas dalam proses audit dimiliki oleh afiliasi *big four*. Hal ini menjadikan penentuan *fee* audit yang lebih tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Naser dan Nuseibeh (2007), Angelina (2021), dan Rustomo (2021) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang diajukan, yakni:

H₄ = Afiliasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap *fee* audit

2.9. Kerangka Berpikir

